OTORITAS JASA KEUANGAN

SATU DASAWARSA OJK MENGABDI UNTUK NEGERI

ROADMAP

PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA

Bagi Industri BPR dan BPRS

2021 - 2025

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

ROADMAP

PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA

Bagi Industri BPR dan BPRS

2021 - 2025

"It is not the strongest of
the species that survives,
nor the most intelligent that survives.
It is the one that is
the most adaptable to change."

Charles Darwin

Daftar Isi

Sambutan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan 6

PENDAHULUAN 8

KINERJA BPR DAN BPRS 10

TANTANGAN PERBANKAN 12

PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN INDUSTRI BPR DAN BPRS 14

1. Mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 14
2. Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan dan Industri Perbankan Secara Umum 15
3. Tantangan dan Peluang yang Dihadapi Industri BPR dan BPRS Di Era Digitalisasi 16

ARAH PENGEMBANGAN BPR DAN BPRS 2021-2025 17

Pilar 1 - Penguatan Struktur dan Keunggulan Kompetitif 19

Pilar 2 - Akselerasi Transformasi Digital 20

Pilar 3 - Penguatan Peran BPR dan BPRS Terhadap Daerah atau Wilayah 21

Pilar 4 - Penguatan Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan 22

Perangkat Pendukung (*Enabler*) 23

PROGRAM KERJA ROADMAP PENGEMBANGAN BPR DAN BPRS 2021-2025 24

Pilar 1 - Penguatan Struktur dan Keunggulan Kompetitif 24

Pilar 2 - Akselerasi Transformasi Digital 25

Pilar 3 - Penguatan Peran BPR dan BPRS Terhadap Daerah atau Wilayah 25

Pilar 4 - Penguatan Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan 26

Sambutan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Assalamu'alaikum Wr. Wb., Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2021-2025 bagi Industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ini selesai disusun sebagai pijakan arah kebijakan dalam pengembangan industri BPR dan BPRS ke depan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Perubahan ekosistem yang terjadi secara global maupun nasional membawa tantangan yang harus dihadapi oleh industri perbankan, tidak terkecuali BPR dan BPRS. Dari sisi eksternal, pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI) yang mengakselerasi perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat akan layanan perbankan, serta persaingan antar lembaga jasa keuangan yang semakin ketat, khususnya pada segmen mikro kecil dan menengah, menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi industri BPR dan BPRS. Selain itu, industri ini juga masih harus menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang mungkin masih berlangsung hingga beberapa waktu ke depan.

Selain itu dari sisi internal, BPR dan BPRS juga dihadapkan pada beberapa tantangan struktural, antara lain terkait penguatan permodalan yang belum memadai, optimalisasi penerapan tata kelola, produk serta layanan yang terbatas variasinya, serta keterbatasan pada infrastruktur baik TI maupun kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya.

Memperhatikan kondisi ini, kami memandang bahwa diperlukan komitmen, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat dan mengembangkan industri BPR dan BPRS agar dapat menghadapi tantangan tersebut. Kami sebagai regulator, pada awal tahun 2021 telah menerbitkan RP2I 2020–2025 sebagai rancang bangun arah pengembangan bagi industri perbankan secara umum dan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020–2025 bagi perbankan syariah. Kedua *roadmap* ini menjadi pijakan dalam pengembangan ekosistem industri perbankan diiringi dengan dukungan transformasi pengaturan, pengawasan serta perizinan yang kondusif bagi industri untuk bertumbuh dan dapat melangkah ke arah yang sama. Sejalan dengan *roadmap* dimaksud dan mempertimbangkan industri BPR dan BPRS memiliki karakteristik tersendiri, maka dipandang perlu untuk menyusun peta jalan dan arah pengembangan dalam memperkuat industri ini secara spesifik, untuk menghadapi berbagai tantangan sampai 5 tahun ke depan.

RP2I bagi Industri BPR dan BPRS yang selanjutnya disebut RBPR-S 2021–2025 disusun sebagai upaya untuk mengembangkan industri ini menuju ke arah yang lebih baik, sehingga dapat tercipta industri yang *agile* dan adaptif dalam menghadapi perubahan ekosistem ke depan. Dengan demikian, industri BPR dan BPRS diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terutama pada daerah atau wilayahnya, serta dapat menjadi industri yang memiliki daya tahan dan daya saing yang baik.

RBPR-S 2021 - 2025 ini merupakan *living document* yang dapat terus disesuaikan dengan dinamika perkembangan industri dan ekosistem industri jasa keuangan, sehingga dapat direspon dengan kebijakan yang relevan, tepat waktu dan tepat substansi untuk mendukung daya tahan dan daya saing industri BPR dan BPRS.

Akhir kata, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, komentar dan saran yang sangat berharga dalam penyusunan *roadmap* ini. Semoga tujuan mulia untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang *agile*, adaptif, kontributif dan *resilient* ke depan dapat terwujud melalui ridho Tuhan Yang Maha Kuasa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb., Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya, Salam kebajikan.

Heru Kristiyana

Pendahuluan

Industri BPR dan BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya kepada segmen mikro dan kecil.

Industri ini memiliki karakteristik yang membuat keberadaan BPR dan BPRS masih sangat dibutuhkan oleh mayarakat hingga saat ini, seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten atau Kecamatan, pemberian layanan yang mengedepankan pendekatan personal atau kekeluargaan, proses pelayanan yang cepat dan sederhana, serta karakter produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah atau wilayahnya.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI) serta perubahan pola perilaku masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perubahan ekosistem global dan nasional, menuntut industri BPR dan BPRS untuk dapat menyediakan produk dan layanan yang memenuhi ekspektasi masyarakat terutama nasabah. Ke depan, tantangan yang akan dihadapi perbankan, khususnya BPR dan BPRS akan semakin dinamis dan beragam, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan dampak signifikan pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Pembatasan aktivitas masyarakat sebagai salah satu kebijakan penanggulangan pandemi oleh Pemerintah Indonesia mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Tidak hanya pada sektor riil, namun selama pandemi ini sektor UMKM juga menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup hebat. Hal ini dapat membuat UMKM selain memperlambat ekspansi usaha juga mengurangi kemampuannya sebagai debitur bank dalam melunasi pinjamannya. Kondisi dimaksud akan meningkatkan risiko kredit, terutama pada industri BPR dan BPRS yang memiliki debitur dengan segmen utama pada sektor UMKM.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga mengakselerasi perubahan perilaku masyarakat dan kebutuhannya terhadap produk dan layanan keuangan yang dapat diakses dimana pun dan kapan pun. Dengan demikian, adaptasi TI terhadap produk dan layanan perbankan juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri perbankan, khususnya bagi BPR dan BPRS yang ditengarai lebih banyak menyediakan produk dan layanan kepada nasabahnya secara tatap muka.

Industri BPR dan BPRS juga dihadapkan pada tantangan struktural dari sisi internal, seperti aspek permodalan, tata kelola, manajemen risiko, infrastruktur, produk dan layanan. Hal tersebut merupakan fundamental bagi industri BPR dan BPRS dalam meningkatkan daya saingnya untuk dapat menghadapi tantangan eksternal ke depan, serta menghadapi persaingan antar lembaga jasa keuangan (LJK) yang semakin ketat.

Untuk menghadapi tantangan eksternal maupun struktural tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan RBPR-S sebagai peta jalan dan arah pengembangan bagi industri BPR dan BPRS dalam memperkuat industri ini menghadapi berbagai tantangan sampai 5 tahun ke depan. Harapannya, industri BPR dan BPRS dapat menjadi bank yang *agile*, adaptif, kontributif, dan *resilient* dalam memberikan akses keuangan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) dan masyarakat dalam lingkup daerah atau wilayahnya.

Kinerja Industri BPR dan BPRS

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, industri BPR dan BPRS masih menunjukkan tren perkembangan kinerja yang positif di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 dan persaingan antar LJK yang begitu ketat. Khusus pada industri BPR, terjadi penurunan jumlah BPR di Indonesia akibat penerapan konsolidasi melalui penggabungan maupun peleburan.

Jumlah Bank dan Jaringan Kantor	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jun-21
Jumlah BPR	1.637	1.633	1.619	1.597	1.545	1.506	1.492
Badan Hukum	1.637	1.633	1.619	1.597	1.545	1.506	1.492
- PT	1.410	1.409	1.397	1.402	1.389	1.350	1.339
- PD	197	201	199	171	136	136	135
- Kop	30	23	23	24	20	20	18
Kantor BPR	3.198	3.238	3.255	3.279	3.303	3.304	3.305
- KP	1.637	1.633	1.619	1.597	1.545	1.506	1.492
- KC	1.561	1.605	1.636	1.682	1.758	1.798	1.813
Jumlah BPRS	163	166	167	167	164	163	163
Badan Hukum	163	166	167	167	164	163	163
- PT	163	166	167	167	164	163	163
- PD	-	-	-	-	-	-	-
- Kop	-	-	-	-	-	-	-
Kantor BPRS	267	261	266	286	331	338	341
- KP	163	166	167	167	164	163	163
- KC	104	95	99	119	167	175	178

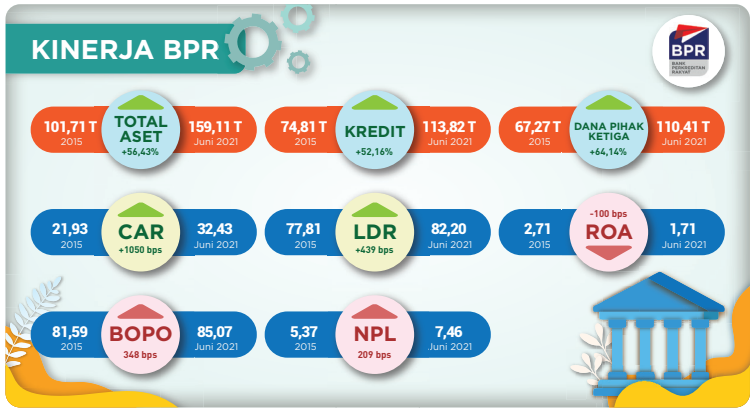

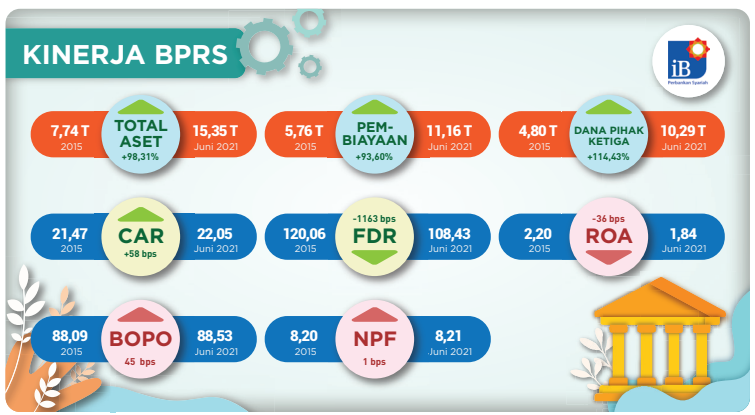

Sumber: OJK (diolah)

Tantangan Perbankan

> **Tantangan yang akan dihadapi industri Perbankan ke depan bersumber dari kondisi eksternal maupun internal, sehingga perlu direspon secara cermat dengan strategi yang tepat.**

Industri Perbankan baik bank umum maupun BPR dan BPRS masih akan menghadapi berbagai tantangan ke depan, terutama tantangan yang bersumber dari kondisi eksternal dan tantangan jangka pendek sebagai dampak pandemi Covid-19 yang dapat berpengaruh terhadap kinerja bank. Selain itu, industri BPR dan BPRS juga harus menghadapi tantangan struktural dari sisi internal industri tersebut, antara lain permodalan khususnya bagi BPR dan BPRS dengan kondisi permodalan yang belum memadai, penerapan tata kelola yang masih dapat dioptimalkan, keterbatasan pada infrastruktur TI, kuantitas dan kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, serta variasi produk dan layanan yang masih perlu diperluas dan dikembangkan. Hal tersebut dapat berdampak pada daya saing BPR di tengah persaingan antar LJK yang semakin ketat dan disrupsi teknologi digital yang tidak terelakkan. Berbagai tantangan tersebut perlu direspon secara cermat melalui strategi yang tepat melalui kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.

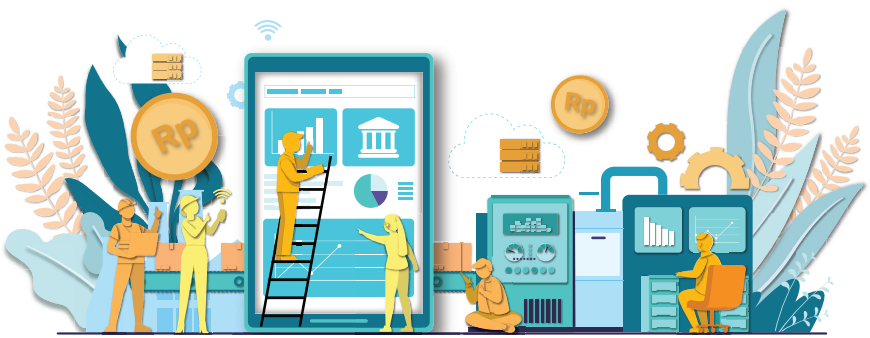

Prinsip Dasar Pengembangan Industri BPR dan BPRS

RBPR-S disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang, OJK memiliki wewenang untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, termasuk industri BPR dan BPRS. Oleh karena itu, OJK perlu menyusun rancang bangun terkait arah pengembangan industri tersebut sehingga BPR dan BPRS dapat berkontribusi secara optimal dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat.

2. Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan dan Industri Perbankan secara Umum

RBPR-S disusun berdasarkan arah kebijakan sektor jasa keuangan sebagaimana tertuang dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan, RP2I 2020-2025 sebagai arah pengembangan industri perbankan secara umum, dan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025 sebagai arah pengembangan khusus bagi industri perbankan syariah. RP2I dan RP2SI bertujuan untuk menjadi pijakan dalam pengembangan ekosistem industri perbankan dan infrastruktur pengaturan, pengawasan serta perizinan ke depan. Mengingat industri BPR dan BPRS memiliki karakteristik tersendiri, maka OJK perlu untuk menyusun peta jalan dan arah pengembangan dalam memperkuat industri ini menghadapi berbagai tantangan sampai 5 tahun ke depan.

3. Tantangan dan Peluang yang Dihadapi Industri BPR dan BPRS di Era Digitalisasi

Perkembangan dan pemanfaatan TI menciptakan tantangan dan peluang yang mengharuskan BPR dan BPRS untuk beradaptasi dan bertransformasi sehingga dapat mempertahankan daya saingnya. Kondisi ini perlu direspon melalui suatu kebijakan dan strategi digitalisasi BPR dan BPRS yang efektif dengan memperhatikan kondisi dan tantangan pada sisi internal industri BPR dan BPRS itu sendiri. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa digitalisasi juga menghadirkan potensi risiko baru yang perlu diantisipasi oleh BPR dan BPRS. Oleh karena itu, diperlukan suatu arah pengembangan bagi industri BPR dan BPRS di era digitalisasi ini sehingga industri dapat memanfaatkan peluang pengembangan bisnis secara optimal namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Arah Pengembangan BPR dan BPRS 2021-2025

RBPR-S memuat arah pengembangan struktural sebagai upaya untuk memperkuat industri ini dalam menghadapi tantangan baik dari kondisi eksternal, tantangan jangka pendek, maupun tantangan struktural yang dihadapinya. Melalui *roadmap* ini, diharapkan visi BPR dan BPRS untuk menjadi **bank yang *agile*, adaptif, kontributif dan *resilient*, dalam memberikan akses keuangan kepada UMK dan masyarakat di daerah atau wilayahnya dapat terwujud.**

Peran dan kontribusi industri BPR dan BPRS terhadap daerah atau wilayah dapat diwujudkan melalui dukungan fundamental yang kuat pada internal industri ini, terutama terkait aspek penguatan permodalan, penguatan daya saing dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, serta penguatan daya tahan industri BPR dan BPRS. Di samping itu, perkembangan TI yang sangat pesat menuntut BPR dan BPRS untuk dapat mengikuti perubahan ekosistem perekonomian yang terjadi. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan transformasi digital sehingga industri BPR dan BPRS dapat terus bersaing dan bertumbuh.

Dalam rangka mewujudkan visi pengembangan industri BPR dan BPRS tersebut, peran otoritas sangat diperlukan untuk mendukung industri dari sisi pengaturan, perizinan dan pengawasan. Selanjutnya, diperlukan pula hal-hal pendukung seperti kepemimpinan dan manajemen perubahan, kuantitas dan kualitas SDM, infrastruktur TI, serta kolaborasi dan kerjasama sektoral dalam implementasi *roadmap* tersebut.

PILAR 1
PENGUATAN STRUKTUR DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri BPR dan BPRS, penguatan permodalan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas BPR dan BPRS dalam mengembangkan usahanya, menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang baik, serta menghadapi digitalisasi industri keuangan. Inovasi produk dan layanan serta kemitraan dengan lembaga atau institusi lain juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan menciptakan ruang yang lebih besar untuk berekspansi bagi BPR dan BPRS.

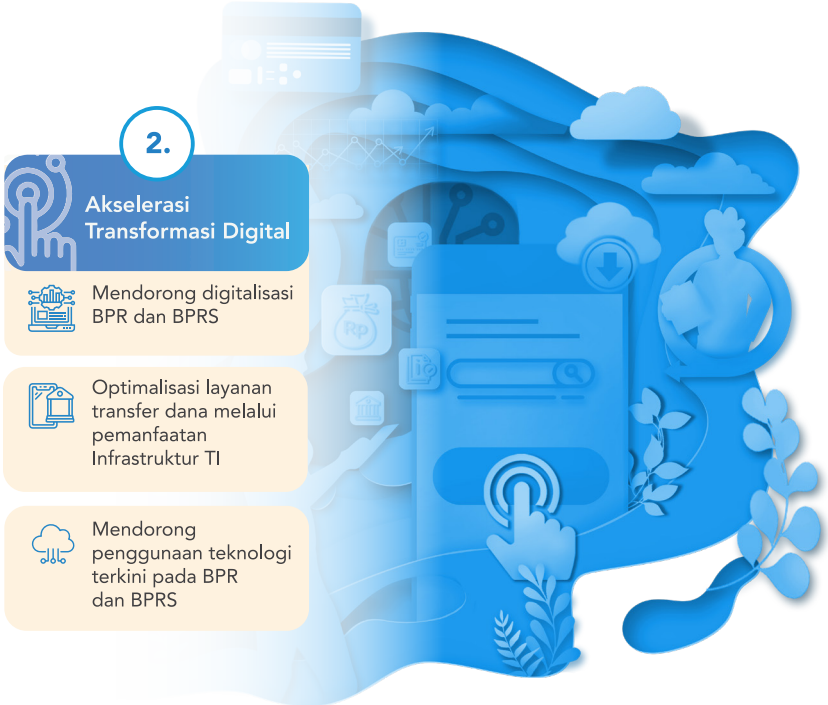

PILAR 2
AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL

Pemanfaatan TI yang semakin masif dan perubahan pola perilaku masyarakat, menuntut BPR dan BPRS untuk selalu mengembangkan infrastruktur TI nya agar dapat melayani nasabahnya secara *mobile* dengan lebih cepat dan aman. Digitalisasi produk dan layanan dapat menjadi nilai tambah bagi nasabah dalam berinteraksi dengan BPR dan BPRS, serta meningkatkan daya saing BPR dan BPRS di tengah kompetisi yang semakin ketat. Digitalisasi tersebut juga merupakan partisipasi BPR dan BPRS dalam pengembangan ekosistem digital di daerahnya.

PILAR 3
PENGUATAN PERAN BPR DAN BPRS TERHADAP DAERAH ATAU WILAYAH

Awareness masyarakat terkait BPR dan BPRS harus terus ditingkatkan untuk memperkenalkan BPR dan BPRS yang merupakan bank, membangun pemahaman masyarakat dan memperluas basis nasabah. Peningkatan *awareness* tersebut dapat mendorong masyarakat khususnya segmen UMK untuk menjadikan BPR dan BPRS sebagai sumber pendanaan dalam pengembangan usahanya.

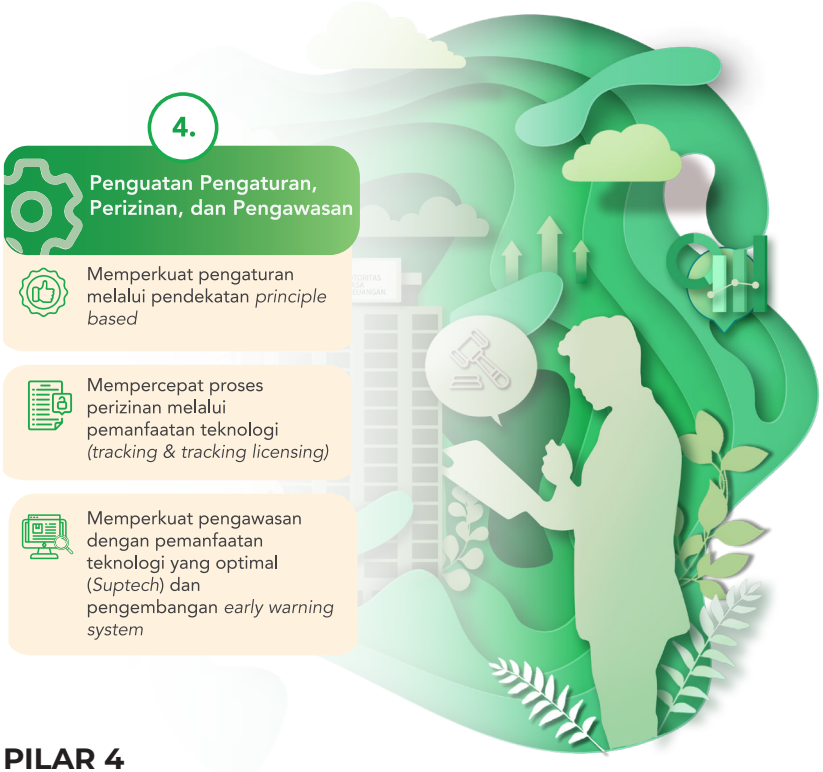

PILAR 4
PENGUATAN PENGATURAN, PERIZINAN DAN PENGAWASAN

Jumlah BPR dan BPRS yang cukup banyak membutuhkan pengawasan berbasis TI atau yang dikenal dengan *supervisory technology* dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan serta percepatan proses perizinan yang memanfaatkan TI sehingga proses menjadi lebih efisien. Selain itu, dalam rangka mendorong inovasi produk dan layanan BPR dan BPRS diperlukan reformasi pengaturan yang sebelumnya bersifat *rule-based* menjadi *principle based*.

PERANGKAT PENDUKUNG (*ENABLER*)

Keberhasilan pencapaian arah pengembangan BPR dan BPRS melalui keempat pilar tersebut memerlukan dukungan yang optimal dari perangkat pendukung (*enabler*), yaitu kepemimpinan dan manajemen perubahan, kuantitas dan kualitas SDM, infrastruktur TI serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian diharapkan visi pengembangan BPR dan BPRS sebagai tujuan dari *roadmap* ini dapat tercapai dengan baik.

Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS 2021 - 2025

Pilar 1 - Penguatan Struktur dan Keunggulan Kompetitif

PROGRAM KERJA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Penguatan Permodalan dan Akselerasi Konsolidasi
- Penguatan Permodalan BPR dan BPRS *existing* atau baru, termasuk dukungan permodalan di era digitalisasi
- Konsolidasi Industri dengan mekanisme Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan untuk mencapai skala usaha ekonomis, termasuk bagi BPR Grup
- Kebijakan *Exit Policy* BPR dalam rangka percepatan penanganan BPR bermasalah

Peningkatan Daya Saing melalui Penguatan Manajemen Risiko & Tata Kelola
- Optimalisasi penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik
- Penyempurnaan ketentuan penilaian tingkat kesehatan BPR yang memasukkan aspek risiko dan tata kelola
- Kebijakan pencegahan kejadian *Fraud* maupun Tipibank lainnya

Pengembangan Inovasi Produk dan Layanan
- Kebijakan Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS
- Penyusunan analisis kinerja dan daya saing BPR di era *new normal*

Peningkatan Kolaborasi dan Konektivitas dengan Lembaga/ Institusi Lain
- Kolaborasi dan konektivitas antara BPR dan BPRS dengan Bank Umum, Asuransi, *Fintech*, dsb

Pilar 2 - Akselerasi Transformasi Digital

PROGRAM KERJA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Mendorong digitalisasi BPR dan BPRS
- Program Digitalisasi BPR dan BPRS
- Peningkatan Kualitas SDM BPR dan BPRS untuk mendukung transformasi digital
- Kebijakan yang mendukung Transformasi Digital bagi BPR dan BPRS

Optimalisasi transfer dana melalui pemanfaatan sarana TI
- Pelaksanaan transfer dana dengan memanfaatkan infrastruktur TI melalui kerjasama dengan lembaga lain (Bank Umum, *Fintech*, PJTI, dsb).

Mendorong penggunaan teknologi terkini pada BPR dan BPRS (a.i. *Cloud*, dsb)
- Pelaksanaan *Workshop/ Capacity Building/* Seminar terkait penggunaan teknologi terkini pada BPR dan BPRS
- Pelaksanaan *Networking Event, Knowledge Sharing*, atau Seminar terkait Pemanfaatan TI

Pilar 3 - Penguatan Peran BPR dan BPRS Terhadap Daerah atau Wilayah

PROGRAM KERJA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Peningkatan peran BPR dan BPRS dalam pembiayaan kepada UMK di daerah atau wilayah
- Peningkatan kontribusi BPR dan BPRS pada segmen UMK dan pembangunan daerah
- Mendorong peran BPR dan BPRS dalam penyaluran kredit atau pembiayaan pada segmen UMK
- Kebijakan untuk mendorong BPR dan BPRS berpartisipasi dalam program Pemerintah terkait kredit atau pembiayaan UMK

Akses dan Edukasi Keuangan
- Peningkatan peran BPR dan BPRS dalam implementasi program inklusi keuangan "KEJAR"
- Peningkatan Literasi dan Edukasi Industri BPR dan BPRS
- Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Industri BPR dan BPRS

Pilar 4 - Penguatan Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan

PROGRAM KERJA	2021	2022	2023	2024	2025
Memperkuat pengaturan dengan menggunakan pendekatan *principle based*	Penyusunan ketentuan baru yang mengedepankan *principle based*				
	Penyempurnaan ketentuan dan sistem/ aplikasi terkait pelaporan BPR dan BPRS				
		Kebijakan standar akuntansi BPR dengan mengacu pada SAK EP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat)			
Mempercepat proses perizinan melalui pemanfaatan teknologi (*tracking & tracing licensing*)	Implementasi perizinan berbasis teknologi (a.l. *SPRINT*)				
Memperkuat pengawasan dengan pemanfaatan teknologi yang optimal (*Suptech*) dan pengembangan sistem *early warning system*	Penyesuaian Pola Pengawasan BPR yang lebih terfokus berdasarkan risiko				
	Penyempurnaan ketentuan dan sistem/aplikasi terkait pengawasan (a.l. *OBOX* BPR)				
	Koordinasi dengan otoritas terkait dalam hal penanganan bank bermasalah				
	Peningkatan kualitas pengawasan BPR dan BPRS dalam rangka pencegahan *Fraud* & Tipibank melalui penyusunan buku *database* hasil putusan pengadilan				
	Membangun SDM OJK yang unggul di era digital				
	Penerapan pengawasan berbasis Teknologi Informasi				

"The game of business used to be like football: size mattered. Then it changed to basketball: speed and agility. Today, business is more like chess. Customer priorities change continually, and the signals given by these change are vital clues to next cycle of growth."

Adrian Slywotzky

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Bank Indonesia
Menara Radius Prawiro
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10110
Tel. 62 21 296 00000

www.ojk.go.id
@ojkindonesia
@ojkindonesia
official.ojk
Jasa Keuangan
Kontak OJK 157